

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Pujianti¹, Gerry Katon Mahendra^{2*}

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

gerrykatonvw@gmail.com*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received Desember 2023

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

Keywords

The Role of the Regional;

Agency for Disaster;

BPBD;

Management Flood

ABSTRACT

Almost every year, Indonesia experiences flood disasters, such as those experienced in Pandeyan Village. Thus, Pandeyan Subdistrict needs the role of Yogyakarta City BPBD in flood disaster management efforts. This research aims to determine and analyze the role of the Yogyakarta City BPBD in managing flood disasters in Pandeyan Village, Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta City. This research uses descriptive qualitative research and uses data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the role of Yogyakarta City BPBD in flood disaster management has carried out and fulfilled its role in accordance with the role theory put forward by Sondang P. Siagian. Yogyakarta City BPBD has played a role in flood disaster management efforts through several programs and activities carried out in Pandeyan Village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan alam melimpah namun disisi lain Indonesia memiliki tingkat resiko bencana yang sangat tinggi seperti bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Selain itu Indonesia juga sering mengalami bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim, abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, dan kebakaran. Bencana banjir sendiri merupakan bencana alam yang umum dan sering terjadi di berbagai daerah yang menyebabkan korban jiwa sampai kerugian ekonomi yang sangat besar setiap tahunnya, yang secara serius dapat mengganggu perkembangan pembangunan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan (Kurniawan et al., 2021). Bencana banjir bisa sangat membahayakan manusia dan lingkungan sekitar maka perlu adanya penanggulangan bencana yang baik dan benar untuk meminimalisir dampak bencana banjir. Penanggulangan bencana merupakan ilmu yang membahas



DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1457

Pujianti dan Mahendra, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta (2023)

mengenai bencana dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bencana, seperti resiko bencana yang akan muncul dan cara menghindari resiko bencana maupun dampaknya. Penanggulangan bencana merupakan sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan fungsi pengendalian penanggulangan bencana menurut Nurjanah et al, dalam (Sofyan, 2019).

Di Indonesia angka kejadian bencana banjir masih tergolong tinggi di setiap tahunnya. BNPB telah merilis data terkait bencana banjir di Indonesia. Data bencana banjir di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Indonesia dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kejadian
2018	506
2019	784
2020	1.518
2021	1.794
2022	1.532

Sumber : (BNPB, 2023a), Data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, Indonesia mengalami kejadian bencana banjir per tahun 2021 sebanyak 1.794 kejadian dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 1.532 kejadian. Sementara untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) data kejadian bencana banjir telah dirilis oleh BPBD DIY. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Jumlah Kejadian Bencana Banjir di DIY dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kejadian
2018	20
2019	0
2020	10
2021	13
2022	164

Sumber : (DIY, 2023), Data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, DIY mengalami kejadian bencana banjir per tahun 2021 sebanyak 13 kejadian, serta mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 164



kejadian. Sementara untuk wilayah Kota Yogyakarta data bencana banjir telah dirilis oleh BPBD DIY, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Data Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kota Yogyakarta dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kejadian
2018	2
2019	0
2020	0
2021	1
2022	8

Sumber : (DIY, 2023), Data diolah.

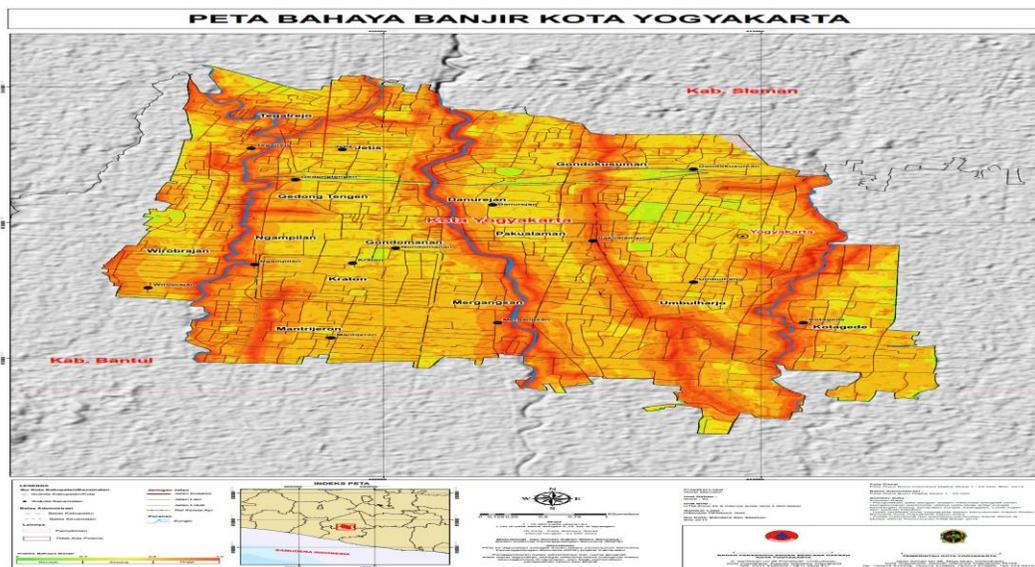
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kejadian bencana banjir di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2021 terjadi 1 kejadian dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 8 kejadian. Sementara untuk kejadian banjir di wilayah Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Kejadian Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo dari Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2020	2022
Keterangan	Di Kelurahan Pandeyan RT 30 RW 08 Kemantren Umbulharjo mengalami genangan pada Maret 2018. Genangan tersebut terjadi karena luapan sungai Gajah Wong sehingga menyebabkan talud di pinggir sungai longsor setelah air sungai surut. (Halim & Fatoni, 2018).	Di Gambiran RW 8, Pandeyan Kemantren Umbulharjo mengalami genangan pada 11 Maret 2020. Genangan tersebut terjadi akibat luapan air sungai karena hujan deras yang melanda Kota Yogyakarta. (Syambudi & Amali, 2020).	Di Gambiran 9 rumah di RW 10 dan 2 rumah di RW 13 Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo mengalami luapan air sungai Gajah Wong pada 2 Oktober 2022. Luapan air tersebut terjadi karena hujan deras yang melanda Kota Yogyakarta. (Ramadhan & Fatoni, 2022).
Sumber	TribunJogja.com	Tirto.Id	TribunJogja.com



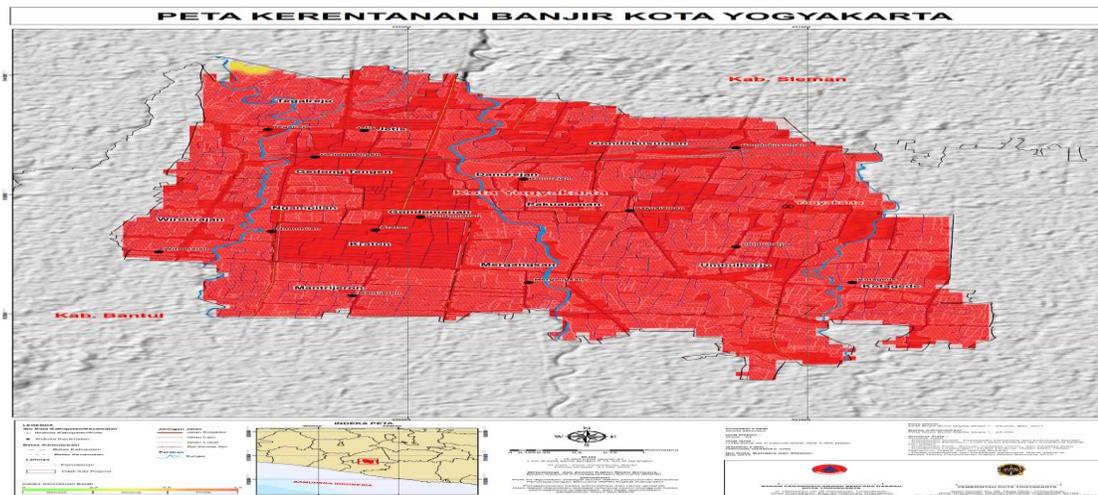
BPBD Kota Yogyakarta juga telah merilis peta bahaya banjir di Wilayah Kota Yogyakarta yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : (Yogyakarta, 2023)

Gambar 1. Peta Bahaya Banjir di Kota Yogyakarta

Berdasarkan peta bahaya banjir diatas, maka dapat dipahami bahwa tingkat bahaya bencana banjir di wilayah Kelurahan Pandeyan yang berada di bantaran sungai adalah tinggi dan wilayah yang tidak dekat dengan bantaran sungai adalah sedang. Adapun gambar peta kerentanan banjir di wilayah Kota Yogyakarta sebagai berikut:



Sumber : (Yogyakarta, 2023)

Gambar 2. Peta Kerentanan Banjir di Kota Yogyakarta



Berdasarkan peta kerentanan banjir diatas, maka dapat dipahami bahwa tingkat kerentanan banjir di wilayah Kelurahan Pandeyan adalah tinggi. Menurut (Handoko, 2022) wilayah Kemantren Umbulhajo Kota Yogyakarta memiliki ketinggian tanah di bawah permukaan air sungai sehingga wilayah yang berada di sepanjang sungai akan menjadi wilayah rawan bencana banjir. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak bencana banjir yaitu perlu adanya peran masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi banjir. Dikutip dari (Sekartaji et al., 2022) menjelaskan bahwa peran merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang, kelompok, organisasi, maupun badan atau lembaga atas status atau kedudukannya yang diharapkan memberikan pengaruh baik bagi sekelompok orang lain maupun lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang di atas Kelurahan Pandeyan memiliki ketinggian tanah di bawah permukaan air sungai sehingga wilayah yang berada di sepanjang sungai Gajah Wong akan menjadi wilayah yang rawan banjir luapan sungai, hal tersebut perlu untuk di perhatikan oleh BPBD Kota Yogyakarta yakni perlu adanya upaya penanggulangan bencana banjir luapan sungai dengan baik dan benar. Peran BPBD Kota Yogyakarta sangatlah penting dalam penanggulangan bencana banjir guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana maupun dampak yang akan ditimbulkan akibat dari bencana banjir. Dan berdasarkan masalah bencana banjir yang ada, penelitian ini ingin mencoba mengurai sejauh mana peran BPBD Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informannya yaitu pihak BPBD Kota Yogyakarta, pihak Kelurahan Pandeyan, dan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Sondang P. Siagian (2012) yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Selaku Stabilisator

Berdasarkan indikator pemerintah selaku stabilisator, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak BPBD Kota Yogyakarta, Lurah Kelurahan Pandeyan, dan masyarakat untuk membahas mengenai kegiatan atau program apa saja yang telah dilakukan BPBD Kota Yogyakarta dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Berikut salah satu hasil wawancara kepada S selaku Sub bagian Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kota Yogyakarta, mengungkapkan bahwa:

"Pertama dari BPBD itu, Program pertama itu adalah pemasangan EWS (Early Warning System) rancangan untuk peringatan dini kalau ada terjadi banjir di sungai Gajah Wong itu ada di Pandeyan, terus yang keduanya ada program dari DIY tapi kita yang melaksanakan, itu ada namanya KALTANA (Kelurahan Tangguh Bencana) itu



spotnya Kelurahan, lokusnya di progam KALTANA itu sudah ada penilaian semacam story kebencanaan yang ada dan itu dilihat dari nilai tertinggi itu nanti yang menjadi lokus sebagai sampling dari pegang mutu untuk melaksanakan simulasi, terus yang lain kalau di Pandeyan ada program KTB (Kampung Tangguh Bencana) itu levelnya di bawah Kelurahan. Pandeyan itu kan ada dua kampung ada Kampung Pandeyan dan Kampung Gambiran kalau berbicara EWS itu ada di dua lokasi di Pandeyan ada di Gambiran ada, disana juga sudah ada Kampung Tangguh Bencana juga.” (Wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 11.00 WIB)

Kemudian wawancara selanjutnya akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada GE selaku Analis Tata Usaha di BPBD Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

“Saat terjadi bencana kita ada layanan kebencanaan, reaksi kaji cepat, dan reaksi cepat tanggap darurat. Kemudian pascabencana kita juga melakukan semacam rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk rehabilitasi menyangkut banyak aspek sosial, budaya, fisik gitu, untuk rehabilitasi mungkin ketika terjadi bencana warga ada yang syok secara psikologis itu juga kita bantu, kemudian ada bangunan yang roboh karena gempa atau banjir kita juga memberikan bantuan. Untuk bantuan itu teknisnya ada di sub koordinator rehabilitasi dan rekonstruksi.” (Wawancara pada 4 Juli 2023, pukul 12.30 WIB)

Kemudian wawancara selanjutnya akan membahas mengenai apakah kegiatan dan pelatihan sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap masalah kebencanaan. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada S selaku Lurah Kelurahan Pandeyan, mengungkapkan bahwa:

“Sudah cukup karena sudah ada cross check kemudian di koordinasikan bersama. Kemudian sudah ada juga KTB yang mana dari situ sudah dibekali ilmu dalam menghadapi bencana” (Wawancara pada 27 Juni 2023, pukul 15.15 WIB)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada T selaku Ketua RT 51 Gambiran, mengungkapkan bahwa:

“Ya sudah ada gambaranlah, iya sudah cukup.” (Wawancara pada 9 Juli 2023, pukul 15.10 WIB)

Pemerintah selaku Inovator

Berdasarkan indikator pemerintah selaku inovator, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak BPBD Kota Yogyakarta, Lurah Kelurahan Pandeyan, dan masyarakat untuk membahas mengenai inovasi apa yang telah dilakukan BPBD Kota Yogyakarta dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada S selaku Sub bagian Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:



“Inovasi, kalau inovasi kita membuat Early Warning System (EWS), itu inovasinya kita itu sudah dibuat dari tahun 2013 sampai saat ini di Sungai Gajah Wong itu sudah ada tiga titik EWS, jadi kalau dapat dikatakan 100% untuk mengcover belum tapi itu sudah dianggap sudah cukup untuk memberikan informasi di daerah-daerah rawan banjir tapi di Sungai Gajah Wong sendiri sekarang sudah ada taludnya jadi dari ujung sana sampai selatan sana sudah bertalud semua jadi insyaallah kalau ada banjir ada limpasan sudah bisa di minimalisir. Dari perbatasan kota itukan masuknya dari belakang Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” itu yang sisi barat itu Kota yang sisi timur Bantul dan itu sudah sampai perbatasan Bantul di dekat terminal Giwangan itu sudah bertalud semua, ya kalau nggak talud nanti ada yang berjongkal kalau ada limpasan air sudah aman.” (Wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 11.20 WIB)

Kemudian wawancara selanjutnya akan membahas mengenai Fasilitas apa sajakah yang disediakan BPBD Kota Yogyakarta untuk masyarakat di Kelurahan Pandeyan. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada S selaku Sub bagian Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Kalau fasilitas secara umum yaitu nanti setelah terbentuk Kampung Tangguh Bencana (KTG) itu ada peralatan untuk pendukung ada roda tiga, ada senso, ada pompa air portable, ada genset portable, ada HT itu yang terhubung dengan kami jadi ada satu alat yang istilahnya untuk komunikasi secara bersama-sama menjadi satu titik itu komunikasi dengan BPBD itu cuma satu jalur frekuensi. Terus dari situ ada rescue, dragbar alat untuk pembawa korban, dan di situ juga ada pelatihan pemanfaatan peralatan, pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kegawatdaruratan (PPGD), ada pelatihan rescue untuk masyarakat tapi itu yang melaksanakan pelatihan-pelatihan dari bidang pencegahan kesiapsiagaan bukan di tempat kami, kalau disini sudah beda lagi.” (Wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 11.25 WIB)

Pemerintah selaku Modernisator

Berdasarkan indikator pemerintah selaku modernisator, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak BPBD Kota Yogyakarta, Lurah Kelurahan Pandeyan, dan masyarakat untuk membahas mengenai apakah BPBD Kota Yogyakarta sudah memanfaatkan media sosial dengan baik dalam menyampaikan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada S selaku Sub bagian Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

“Kalau media sosial ada dalam bentuk Instagram, Web tapi kalau masalah baiknya ya seperti itu adanya kita cuma kasih informasi-informasi tapi itu kan juga feedbacknya masyarakat sendiri masih belum antusias untuk merespon, merepost, memberi komen itu masih bisa dikatakan kurang, interaksinya masih kurang, untuk Facebooknya kita ada tapi kondisinya ke log out jadi belum bisa dikondisikan sampai saat ini, bermasalah intinya.” (Wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 11.30 WIB)



Kemudian wawancara selanjutnya akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan sumber daya manusia (masyarakat). Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada S selaku Lurah Kelurahan Pandeyan, mengatakan bahwa:

“Ada kegiatan pelatihan dan sosialisasi sebagai up grade ilmu kebencanaan untuk masyarakat, pihak BPBD juga mengikuti pertemuan warga untuk bersinergi seperti pertemuan PKK, selain memberikan kegiatannya juga ikut membantu program masyarakat seperti bank sampah.” (Wawancara pada 27 Juni 2023, pukul 15.35 WIB)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada S selaku Anggota KTB, mengatakan bahwa:

“Untuk pemberdayaan terdapat tahapan pelatihan kebencanaan dan pembekalan yang diberikan pihak BPBD pun sudah dirasa cukup. Setiap tahun pun akan diadakan peningkatan pembekalan yang dikhususkan ke personil KTB namun untuk pembentukan KTB masyarakat juga ikut bergabung dalam pembentukan KTB tersebut.” (Wawancara pada 27 Juni 2023, pukul 16.30 WIB)

Pemerintah selaku Pelopor

Berdasarkan indikator pemerintah selaku pelopor, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak BPBD Kota Yogyakarta, Lurah Kelurahan Pandeyan, dan masyarakat untuk membahas mengenai apakah setiap pegawai sudah menegakkan keadilan, kedisiplinan dan produktif ketika bekerja. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada GE selaku Analis Tata Usaha di BPBD Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Saya jawab cukup saja karena setiap orang beda-beda tapi paling tidak untuk kedisiplinan dan keadilan itu dijamin, kita punya kode etik. Kode etik pegawai itu menegakkan keadilan, kedisiplinan, dan produktifitas ketika bekerja.” (Wawancara pada 4 Juli 2023, pukul 13.15 WIB)

Kemudian wawancara selanjutnya akan membahas mengenai bagaimanakah bentuk kepedulian BPBD Kota Yogyakarta terhadap lingkungan dan sosial. Berikut hasil dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya wawancara kepada S selaku Lurah Kelurahan Pandeyan, mengatakan bahwa:

“Untuk kepedulian mungkin seperti ini ya, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dari kalangan apapun, jadi terhadap sosial itu tidak ada diskriminasi meskipun itu dari rakyat kalangan bawah, semisal kan ada laporan yang di ajukan ke BPBD dari pihak BPBD sendiri tidak melakukan diskriminasi dan tetap di terima. Selain itu juga memberikan bantuan-bantuan sosial misalnya pada saat kemarin Corona itu ada bantuan-bantuan saat pandemi dari pihak BPBD. Dan juga kepeduliannya itu ya dengan pembentukan KTB itu kan di berikan penyuluhan juga, jadi kepedulian terhadap sosial di masyarakat itu ada penyuluhan-penyuluhan bertahap, pemberian bantuan-bantuan sosial, dan lain-lain.” (Wawancara pada 27 Juni 2023, pukul 15.45 WIB)



Pemerintah selaku Pelaksanan Sendiri

Berdasarkan indikator pemerintah selaku pelaksanaan sendiri, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak BPBD Kota Yogyakarta dan Lurah Kelurahan Pandeyan untuk membahas mengenai apakah ada kegiatan yang melibatkan pihak swasta dalam hal penanggulangan bencana banjir, saat terjadi bencana banjir maupun pasca bencana banjir.

Peneliti melakukan wawancara kepada S selaku Sub bagian Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

"Saat ini belum, kita belum menyentuh pihak swasta baik itu Dinas Usaha, kita baru proses untuk menjembatani itu." (Wawancara pada 19 Juni 2023, pukul 11.55 WIB)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada GE selaku Analis Tata Usaha di BPBD Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

"Kalau pihak swasta belum, kita baru menuju kesitu." (Wawancara pada 4 Juli 2023, pukul 13.40 WIB)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada S selaku Lurah Kelurahan Pandeyan mengatakan bahwa:

"Kalau dari pihak BPBD itu tidak bekerjasama secara langsung dengan swasta tetapi kalau melibatkan itu iya tapi tidak yang kontrak jadi melibatkannya seperti kita butuh logistik nih ada nggak kira-kira yang mau masuk jadi pemasok logistik di saat krisis. Jadi kerjasamanya itu lebih ke saling membantu dan itu ada bidang logistik, bidang kesehatan, bidang jasa misal ada perbaikan sesuatu itu ke Dinas Sosial, ada juga dari beberapa Lazis, pabrik SGM, beberapa kampus, dan Ada pihak ketiga juga sebagai CSR (corporate social responsibility) untuk membantu. Jadi mereka itu tidak bekerjasama diatas MoU (Memorandum of Understanding) tetapi sekedar bekerja sama karena ada satu tujuan, tujuan sosial seperti itu." (Wawancara pada 27 Juni 2023, pukul 15.55 WIB)

Berdasarkan dari seluruh wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak BPBD Kota Yogyakarta dan Lurah Kelurahan Pandeyan sesuai dengan indikator Pemerintah sebagai Pelaksana Sendiri mendapatkan hasil bahwa pada setiap kegiatan yang dilakukan pihak BPBD Kota Yogyakarta dalam hal penanggulangan bencana banjir, saat terjadi bencana banjir maupun pasca bencana banjir belum melibatkan pihak Swasta dan pihak BPBD Kota Yogyakarta sedang proses untuk menjembatani hal tersebut. Namun secara tidak langsung pihak BPBD Kota Yogyakarta melibatkan pihak Swasta seperti pada Bidang Logistik, Bidang Kesehatan, Bidang Jasa tanpa adanya kontrak kerja sama di atas MoU dan itu lebih mengarah pada saling membantu untuk tujuan sosial ketika kebutuhan logistik sudah benar-benar krisis. Ada juga pihak lain yang bersedia membantu pihak BPBD Kota Yogyakarta tanpa adanya kontrak kerja sama di atas MoU seperti Dinas Sosial, beberapa Lazis, beberapa kampus, pabrik SGM, dan juga CSR. Maka dapat di pahami bahwa pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan pihak BPBD Kota Yogyakarta dalam hal penanggulangan bencana banjir, saat terjadi bencana banjir maupun pasca bencana banjir.



Pembahasan

Banjir merupakan suatu kejadian dimana suatu wilayah tergenang air akibat luapan sungai yang disebabkan karena hujan deras secara terus menerus ataupun banjir karena ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Khairunisa & Alwin, 2022). Banjir dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon di hutan tanpa melakukan reboisasi ulang, pendangkalan sungai, kurangnya ruang resapan air, dan lain sebagainya. Banjir juga dapat memberikan dampak bagi lingkungan mulai dari dampak yang ringan sampai dampak yang besar seperti rusaknya lingkungan sekitar, pencemaran air, penyebaran penyakit, menyebabkan korban jiwa, hingga membuat perekonomian di suatu daerah menjadi buruk. Oleh sebab itu penanggulangan bencana perlu dilakukan secara terencana dan terarah mulai dari prabencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Penanggulangan bencana banjir sangat di perlukan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak bencana tersebut agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti halnya korban jiwa, kerugian, kerusakan, dan juga gangguan aktivitas sehari-hari (Jaya et al., 2021).

Dalam penanggulangan bencana banjir maka perlulah peran dari masyarakat dan juga pemerintah. Peran sendiri merupakan pengaruh dari seseorang ataupun kelompok yang diharapkan dalam sebuah hubungan sosial dan didasarkan oleh status ataupun kedudukan sosial individu atau kelompok (Wiratami et al., 2021). Sedangkan menurut (Ali et al., 2019) peran merupakan sebuah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang telah dimiliki seseorang. Berdasarkan indikator peran yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, mengemukakan bahwa ada lima indikator peran Pemerintah yaitu peran Pemerintah sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, dan Pelaksana Sendiri. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Pemerintah Selaku Stabilisator

Peran BPBD Kota Yogyakarta sebagai stabilisator harus mewujudkan stabilitas dan menjaga masyarakat agar tetap aman dan terkendali dalam keadaan sehari-hari dari ancaman bencana. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Yogyakarta selaku lembaga pemerintahan yang berfokus pada penanggulangan bencana dan bekerja pada sektor kemanusiaan mempunyai tugas untuk melindungi dan melayani masyarakat dari ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Untuk memberikan rasa aman tersebut BPBD Kota Yogyakarta melakukan beberapa program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan yaitu pembentukan KALTANA (Kelurahan Tangguh Bencana), menurut (BNPB, 2023b) KALTANA merupakan sebuah Kelurahan yang dapat mengidentifikasi risiko bencana di wilayahnya, seperti pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas pemulihan bencana, serta dapat mengorganisir sumber daya manusia untuk membangun kapasitas pengurangan risiko bencana. KALTANA pada wilayah Kota Yogyakarta termasuk KALTANA di Kelurahan Pandeyan merupakan sebuah program dari DIY dan dilaksanakan oleh BPBD Kota Yogyakarta.



BPBD Kota Yogyakarta juga melakukan pembentukan KTB (Kampung Tangguh Bencana) di Kampung Pandeyan dan Kampung Gambiran, KTB merupakan yang mempunyai kapasitas adaptasi dan manajemen risiko bencana yang mandiri dan pemulihan bencana yang cepat merugikan jika berkontribusi terhadap bencana (Santoso, 2014). KTB sendiri merupakan inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk menanggulangi bencana pada level Kampung. Adapun kegiatan yang di lakukan di dalamnya yaitu melakukan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pelatihan maupun simulasi kebencanaan sebagai bekal ilmu kebencanaan bagi masyarakat di Kelurahan Pandeyan.

BPBD Kota Yogyakarta selain membentuk KALTANA dan KTB kemudian melakukan pemasangan EWS (Early Warning System), EWS merupakan suatu sistem peringatan dini yang nanti akan menjadi sirine peringatan apabila air sungai meningkat dan debitnya sudah mencapai pada titik tertentu. Pemasangan EWS tersebut berada di dua titik di Kelurahan Pandeyan yaitu di Kampung Gambiran dan Kampung Pandeyan sebagai sistem peringatan dini di Sungai Gajah Wong. Adapun kegiatan yang di lakukan BPBD Kota Yogyakarta pada saat terjadi bencana yaitu memberikan layanan kebencanaan, reaksi kaji cepat, dan reaksi cepat tanggap darurat. Kemudian ketika pasca bencana BPBD Kota Yogyakarta akan melakukan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Selaku Inovator

Peran Pemerintah dalam pembangunan secara keseluruhan harus menjadi sumber dari sesuatu yang menjadi temuan baru yaitu mulai dari metode, sistem, serta cara berpikir yang baru menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022). Termasuk dalam hal penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan tentu BPBD Kota Yogyakarta membutuhkan inovasi atau terobosan baru. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Yogyakarta selaku inovator berupa pemasangan EWS yang merupakan suatu sistem peringatan dini yang nanti akan menjadi sirine peringatan apabila air sungai meningkat dan debitnya sudah mencapai pada titik tertentu. Inovasi pemasangan EWS tersebut sudah dibuat dari tahun 2013 sampai saat ini di Sungai Gajah Wong. Pemasangan EWS tersebut berada di dua titik di Kelurahan Pandeyan yaitu di Kampung Gambiran dan Kampung Pandeyan sebagai sistem peringatan dini di Sungai Gajah Wong. Selain pemasangan EWS inovasi yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta adalah melakukan pembentukan KTB sebagai penguatan Kampung akan berbagai macam bencana, dan melakukan upgrading ilmu kebencanaan setiap tahunnya. Dan BPBD Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir telah memfasilitasi masyarakat di Kelurahan Pandeyan berupa peralatan pendukung ketika terjadi bencana seperti roda tiga, senso, pompa air portable, genset portable, HT, rescue, dragbar dan sebagainya dan apabila peralatan tersebut sudah rusak maupun sudah tidak layak pakai maka pihak BPBD Kota Yogyakarta akan melakukan pembaruan untuk alat-alat tersebut kemudian fasilitas lainnya yang di berikan oleh BPBD Kota Yogyakarta berupa anggaran ketika terjadi bencana, bantuan material, dan dapur umum maupun sarana dan prasarana lainnya untuk masyarakat.



Pemerintah Selaku Modernisator

Peran BPBD Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan sebagai modernisator harus mempunyai kemampuan manajerial, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai kemampuan untuk mengelola Sumber Daya Alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang baik agar tercipta sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kuat dan demokratis, memiliki visi yang jelas terhadap masa depan, dan bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan serta bersedia menerima perubahan, menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Yogyakarta selaku modernisator melakukan pendekatan dengan cara memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan kebencanaan seperti pemanfaatan media sosial berupa Instagram dan Website sebagai upaya penyampaian informasi terkait kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta sudah baik dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat namun feedback dari masyarakat sendiri yang masih kurang dalam berinteraksi di dalam media sosial tersebut. Pemberdayaan sumber daya manusia terhadap penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta diharapkan dapat membuat pengetahuan masyarakat meningkat terhadap penanggulangan bencana dan agar tercipta masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Pemberdayaan yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta tersebut adalah pembentukan KTB yang di dalam KTB tersebut sudah ada berbagai macam kegiatan seperti pelatihan kebencanaan, melakukan sosialisasi kebencanaan, dan edukasi kebencanaan agar masyarakat mempunyai kemampuan dan bekal untuk menghadapi bencana dan agar masyarakat dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang akan merugikan.

Pemerintah Selaku Pelopor

Pemerintah selaku pelopor harus menjadi panutan bagi semua masyarakatnya seperti bekerja dengan produktif, menegakkan keadilan dan kedisiplinan, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, sosial dan budaya, siap berkorban untuk kepentingan negara menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022). Termasuk dalam hal penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan harus menjadi panutan bagi semua masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya sebagai pelopor yaitu sudah mampu bekerja dengan produktif, menegakkan keadilan dan kedisiplinan serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. BPBD Kota Yogyakarta sudah dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal-hal yang positif karena setiap pegawai sudah menegakkan keadilan, kedisiplinan dan produktif ketika bekerja dan pihak BPBD Kota Yogyakarta juga mempunyai kode etik pegawai seperti menegakan keadilan, kedisiplinan, dan produktifitas ketika bekerja.

BPBD Kota Yogyakarta mempunyai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial karena BPBD Kota Yogyakarta bekerja pada sektor kemanusiaan dan penanggulangan bencana maka sudah seharusnya BPBD Kota Yogyakarta peduli terhadap lingkungan dan sosial, bentuk kepedulian BPBD Kota Yogyakarta tersebut yaitu menjadi lembaga pemerintah yang sigap dalam segala urusan yang berkaitan dengan kebencanaan



terutama apabila terjadi bencana yang dapat menyebabkan dampak yang merugikan, maka BPBD Kota Yogyakarta akan menjadi lembaga pemerintah yang pertama untuk langsung turun ke tempat kejadian bencana kemudian memberikan bantuan penyelamatan maupun bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan. Meskipun demikian pada saat kondisi yang benar-benar darurat BPBD Kota Yogyakarta membutuhkan lembaga lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan koordinasi dan rehabilitasi dan Dinas lainnya untuk berkoordinasi terkait bantuan yang dibutuhkan. Kemudian bentuk kepedulian BPBD Kota Yogyakarta yang lainnya adalah memperlakukan masyarakat tanpa diskriminasi baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, semua akan diberikan pelayanan dengan baik, diberikan pembekalan ilmu kebencanaan, edukasi, sosialisasi, penyuluhan, maupun simulasi terkait kebencanaan, dan BPBD Kota Yogyakarta tetap menjalin silaturahmi dengan baik dengan cara mengikuti perkumpulan warga yang juga dihadiri oleh perwakilan dari KTB.

Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri

Pemerintah memang sudah berkewajiban untuk melaksanakan tugas tertentu seperti kegiatan pembangunan karena merupakan tanggung jawab nasional dan karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, keterbatasan anggaran, kemampuan yang belum memadai yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022). Dengan demikian BPBD Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas perannya dalam upaya kepedulian lingkungan sosial, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana banjir hal tersebut bukan semata-mata menjadi bebannya pemerintah namun memang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Yogyakarta belum melibatkan pihak swasta dalam hal penanggulangan bencana banjir, saat terjadi bencana banjir maupun pasca bencana banjir. Maka dapat dipahami bahwa BPBD Kota Yogyakarta telah memenuhi indikator sebagai pelaksana sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir telah menjalankan dan memenuhi perannya sesuai teori peran yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. BPBD Kota Yogyakarta telah berperan dalam upaya penanggulangan bencana banjir melalui program dan kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Pandeyan yaitu melakukan pembentukan KALTANA, KTB, pemasangan EWS, dan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pelatihan maupun simulasi kebencanaan setiap tahunnya di dalam KTB, dan pada saat terjadi bencana memberikan layanan kebencanaan, reaksi kaji cepat, dan reaksi cepat tanggap darurat. Kemudian ketika pasca bencana melakukan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pihak BPBD Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas peralatan pendukung kebencanaan kepada masyarakat di Kelurahan Pandeyan, memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan kebencanaan seperti pemanfaatan media sosial berupa Instagram dan Website sebagai media penyampaian informasi kebencanaan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pandeyan agar tangguh dalam menghadapi



bencana, dan menjadi lembaga yang pertama turun dan siap mencegah, melindungi dan menangani masalah akibat dari bencana banjir.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak BPBD Kota Yogyakarta dapat menciptakan inovasi atau terobosan terbaru yang lebih baik lagi untuk penanggulangan bencana banjir agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman, dapat mempertahankan kinerjanya untuk selalu menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal-hal yang positif seperti menegakkan keadilan, kedisiplinan dan produktif ketika bekerja, mempunyai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial yang lebih besar kepada masyarakat dan lebih meningkatkan kegiatan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

REFERENSI

- Ali, M., Asidah, E., & Husmiati. (2019). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7.
- Alvin, M., & Rinanda, N. (2022). Peran Satuan Tugas Covid-19 dalam Penanganan Covid-19 di Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 4, 75–85.
- BNPB. (2023a). *Geoportal Data Bencana Indonesia*. 2023. <https://gis.bnpb.go.id/>
- BNPB. (2023b). *Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>
- DIY, B. (2023). *PAMOR (Pusat Data Emergency Operation) Grafik Kejadian*. 2023. https://pamor.jogjaprovo.go.id/statistik_grafik_kejadian
- Halim, R., & Fatoni, M. (2018). *Talut yang Ambrol di Pandeyan Umbulharjo Terjadi Setelah Banjir Melanda*. 8 Maret 2018. <https://jogja.tribunnews.com/2018/03/08/talut-yang-ambrol-di-pandeyan-umbulharjo-terjadi-setelah-banjir-melanda>
- Handoko, T. (2022). *Ketinggian Tanah di Bawah Permukaan Air, 4 Kemantren di Jogja Ini Rawan Banjir*. 03 Oktober 2022. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/03/510/1113627/ketinggian-tanah-di-bawah-permukaan-air-4-kemantren-di-jogja-rawan-banjir>
- Jaya, R. P., Qadarsih, A. M., & Pernanda, H. (2021). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 3, 125–133.
- Khairunisa, T., & Alwin. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. *Jurnal Georaflesia*, 7.
- Kurniawan, E., Suharni, E., & Dafip, M. (2021). Sejauh Mana Penanggulangan Bencana Diterapkan Menuju Kesiapsiagaan Banjir: Pembelajaran dari Asesmen Partisipasi Pemuda di Indonesia. *Jurnal Internasional Rekayasa Keselamatan Dan Keamanan*, 11, 175–183.
- Ramadhan, A., & Fatoni, M. (2022). *Sungai Gajahwong Meluap, Puluhan Rumah Warga di Umbulharjo Yogyakarta Terendam Banjir*. 3 Oktober 2022. <https://jogja.tribunnews.com/amp/2022/10/03/sungai-gajahwong-meluap->



- puluhan-rumah-warga-di-umbulharjo-yogyakarta-terendam-banjir
- Santoso, I. (2014). *Panduan Kampung Tangguh Bencana* (B. Purwono & Iswahyuli (eds.)). BPBD Kota Yogyakarta.
- Sekartaji, D. N., Sadat, A., & Nastia. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3, 6967–6974.
- Sofyan, M. (2019). Community Satisfaction of the Urban Flood Control System Improvement Project (UFCSI). *Ilomata International Journal of Social Science*, 1, 29–34.
- Syambudi, I., & Amali, Z. (2020). 3 Kecamatan di Jogja Kebanjiran Akibat Tanggul Jebol & Hujan Deras. 11 Maret 2020. <https://tirto.id/3-kecamatan-di-jogja-kebanjiran-akibat-tanggul-jebol-hujan-deras-eEk5>
- Wiratami, D. D., Nasrul, M., & Fajriyah, A. I. A. (2021). Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 3, 89–98.
- Yogyakarta, B. K. (2023). *Peta Kajian Risiko Bencana*. <https://bpbd.jogjakota.go.id//page/index/peta-kajian-risiko-bencana>

